

Evaluasi Pariwisata Halal Di Kota Mataram

Studi Kasus: Pada Dinas Pariwisata Kota Mataram

Ainur Fadhillah^{1*}, Rahmad Hidayat², Asfarony Hendra Nazwin³, Muhammad Ali⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram
ainurfadhillah268@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 3 September 2026

Page: 977-987

Article History:

Received: 15-06-2026

Accepted: 20-07-2026

Abstrak: Pariwisata halal merupakan sektor strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, khususnya di Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki mayoritas penduduk Muslim serta beragam destinasi wisata budaya, religi, dan kuliner. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram dalam memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif melalui model CIPP (Context, Input, Process, Product). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pariwisata Kota Mataram, pelaku industri pariwisata, masyarakat, dan wisatawan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata halal telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas budaya dan religius masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya pemahaman pelaku industri terhadap standar halal, belum optimalnya promosi destinasi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur dan strategi promosi yang lebih efektif guna mewujudkan kebijakan pariwisata halal yang berkelanjutan di Kota Mataram.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan; Model CIPP; Pariwisata Halal; Kota Mataram; Wisatawan Muslim

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 87% atau ±230 juta jiwa, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata syariah. Pemerintah telah mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui Gerakan Ekonomi Syariah (GERS) dan program pariwisata syariah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak 2013 (Muthoharoh, 2025). Upaya ini diperkuat dengan penetapan beberapa provinsi prioritas pengembangan wisata halal, termasuk Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan pariwisata halal Indonesia menunjukkan capaian signifikan, di mana pada tahun 2019 Indonesia dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia berdasarkan *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata halal memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja (Basit, 2021). Secara global, sektor pariwisata juga menyumbang sekitar 10% terhadap PDB dunia (WTTC, 2020), sehingga menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim global yang diperkirakan mencapai 230 juta pada tahun 2026, kebutuhan terhadap wisata halal juga semakin meningkat (Fadhlan & Subakti, 2022). Wisata halal tidak hanya mencakup kehalalan makanan, tetapi juga mencakup fasilitas akomodasi, ibadah, serta layanan wisata yang sesuai prinsip syariah. Potensi pasar wisata halal yang diperkirakan mencapai USD 300 miliar menjadikan sektor ini sebagai peluang strategis bagi Indonesia, khususnya daerah-daerah potensial seperti Nusa Tenggara Barat.

Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal. Kota ini memiliki berbagai daya tarik seperti wisata budaya, kuliner, sejarah, serta dukungan infrastruktur keagamaan seperti ribuan masjid yang menunjang kebutuhan wisatawan Muslim. Namun demikian, implementasi kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pemahaman pelaku industri terhadap standar halal (Huda, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal memerlukan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix (Fitriyyah, 2022), memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat (Putu, 2024), serta dipengaruhi oleh strategi pengelolaan dan branding destinasi (Saleh & Desky, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak berfokus pada aspek pengembangan, potensi, strategi, dan persepsi terhadap pariwisata halal. Kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram secara menyeluruh masih terbatas, terutama yang meninjau aspek pelaksanaan kebijakan, kesiapan *stakeholder*, pelayanan, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dan wisatawan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Mataram telah mendorong pengembangan wisata halal melalui berbagai kebijakan seperti sertifikasi halal pada sektor pendukung pariwisata. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya pemahaman pelaku industri terhadap standar halal, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata halal (Rustam, 2025). Kondisi ini

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram masih memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan, pada penggunaan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram secara komprehensif. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi juga kesiapan *stakeholder*, kualitas layanan, serta dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian evaluasi kebijakan pariwisata serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam memperkuat ekosistem wisata halal yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami makna, pengalaman, dan evaluasi kebijakan pariwisata halal dari perspektif pelaksana dan pemangku kepentingan. Penelitian dilaksanakan pada Juni 2025-Desember 2025 di Dinas Pariwisata Kota Mataram, dipilih karena peran institusi tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengarsipan kebijakan pariwisata halal. Sampel dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan kepakaran terhadap kebijakan, jumlah informan ditetapkan 6-8 orang sampai mencapai saturasi data, meliputi Kabid Pengelolaan Daya Tarik Wisata (informan kunci), Sekretaris Dinas, dua pegawai unit kebijakan/program, serta 2-3 informan pendukung (pelaku wisata atau tokoh masyarakat). Sumber data terdiri dari data primer wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan, observasi partisipatif di Dinas dan lokasi terkait, serta kuesioner singkat kepada pelaku wisatawan jika diperlukan dan data sekunder seperti dokumen kebijakan (perda), laporan statistik (BPS), serta arsip Dinas. Validitas data dijamin melalui triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), triangulasi sumber (perbandingan antar informan), dan *member checking* dengan informan kunci; peneliti juga mencatat refleksi untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan bias. Analisis data mengikuti tahapan reduksi data, pengkodean tematik, dan penyajian data, bila tersedia untuk membangun tema dan subtema terkait efektivitas serta hambatan pelaksanaan kebijakan. Aspek etika penelitian dipenuhi melalui izin institusional, persetujuan informan, perlindungan identitas informan, dan penyimpanan data yang aman sesuai standar etika riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kebijakan Pariwisata Halal di Kota Mataram

Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model CIPP yang mencakup aspek context, input, process, dan product. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program pariwisata halal yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram telah berjalan secara efektif. Berdasarkan kerangka tersebut, berikut ini hasil evaluasi program pariwisata halal di Kota Mataram berdasarkan model CIPP.

1. *Context*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram didorong oleh kebutuhan riil daerah, yaitu karakteristik masyarakat yang mayoritas beragama Islam, meningkatnya tren wisata halal, serta posisi Kota Mataram sebagai pintu gerbang wisata Pulau Lombok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan telah memiliki dasar kebutuhan (*needs assessment*) yang kuat. Pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram dilatarbelakangi oleh karakteristik masyarakat yang mayoritas beragama Islam, meningkatnya tren wisata halal, serta posisi strategis Kota Mataram sebagai pintu gerbang wisata Pulau Lombok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata halal telah didasarkan pada kebutuhan riil daerah (*needs assessment*) dan memiliki relevansi yang kuat dengan potensi serta karakteristik lokal (Hidayat, 2025).

Temuan ini sejalan dengan teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh (Stufflebeam, 2007), bahwa evaluasi konteks bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, peluang, serta permasalahan yang menjadi dasar penyusunan suatu program. Dalam perspektif CIPP, kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan wisata yang sesuai syariat merupakan alasan yang rasional bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pariwisata halal ke dalam program pembangunan pariwisata.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram belum didukung oleh regulasi teknis khusus di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan masih mengacu pada RIPPARDA dan kebijakan tingkat provinsi sehingga belum memiliki indikator operasional yang jelas. Dari perspektif teori CIPP, kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis kebutuhan telah dilakukan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional yang mampu menjadi pedoman implementasi dan evaluasi.

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu di Indonesia yang menyatakan bahwa pengembangan wisata halal di berbagai daerah masih didominasi oleh pendekatan normatif dan belum sepenuhnya didukung regulasi teknis yang spesifik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wisata halal sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan daerah yang jelas sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian internasional. Adinda, Kusumasari, Hadna, & Susanto (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan halal tourism tidak hanya ditentukan oleh karakteristik masyarakat Muslim, tetapi juga oleh dukungan kebijakan, tata kelola, dan arah pengembangan yang jelas. Demikian pula penelitian (Patrianti & Binol, 2019) menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem halal *tourism* melalui kebijakan yang terintegrasi. Dengan demikian, konteks pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram telah memenuhi aspek kebutuhan masyarakat, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi agar implementasi dapat berjalan lebih efektif.

2. Input

Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan input dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan kelembagaan. Belum semua pelaku usaha memahami standar pelayanan halal, sementara fasilitas seperti

restoran bersertifikat halal, informasi wisata halal, dan sarana pendukung lainnya masih belum tersedia secara merata.

Menurut teori CIPP, evaluasi input bertujuan menilai kecukupan sumber daya, strategi, serta kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan program (Stufflebeam, 2007). Dari perspektif tersebut, kesiapan input di Kota Mataram belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan pengembangan pariwisata halal karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan program dan sumber daya yang tersedia. Temuan penelitian ini sejalan dengan Hidayat (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, ketersediaan infrastruktur, pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram, kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, didukung oleh regulasi yang jelas serta infrastruktur yang memadai, menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, penguatan pada aspek-aspek tersebut diperlukan agar tujuan pengembangan pariwisata halal dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan (Hidayat, 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kendala utama pengembangan wisata halal di Indonesia bukan hanya pada potensi destinasi, tetapi juga pada keterbatasan sumber daya manusia, sertifikasi halal, koordinasi antarinstansi, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Hal tersebut menyebabkan kualitas pelayanan halal masih belum seragam di berbagai destinasi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian internasional. Adinda et al., (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan halal tourism sangat bergantung pada tersedianya fasilitas halal yang lengkap, meliputi makanan halal, tempat ibadah, akomodasi, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Sejalan dengan penemuan tersebut, penelitian Pratama & Annuha (2024), menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi wisata halal di tingkat daerah. Dengan demikian, dari perspektif *input*, kesiapan SDM di Kota Mataram masih memerlukan penguatan melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan sertifikasi yang lebih inklusif.

3. *Process*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram belum dilaksanakan melalui program khusus, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan Dinas Pariwisata seperti promosi destinasi, penyelenggaraan event, pembinaan UMKM, dan penyediaan fasilitas ibadah. Pelaksanaan kebijakan juga masih bergantung pada inisiatif masing-masing pelaku usaha sehingga belum terdapat standar layanan yang seragam.

Dalam teori CIPP, evaluasi proses bertujuan menilai apakah implementasi program telah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Stufflebeam, 2007). Berdasarkan teori tersebut, implementasi di Kota Mataram menunjukkan bahwa program telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi pelaksanaan karena belum didukung oleh standar operasional yang baku maupun sistem monitoring yang terintegrasi. Wahyuni (2024), menegaskan bahwa tanpa standar operasional yang baku, implementasi wisata halal cenderung bersifat simbolik dan bergantung pada komitmen individu pelaku usaha. Kondisi ini mencerminkan bahwa *input* kebijakan yang belum sepenuhnya kuat

(terutama regulasi teknis dan standarisasi) berdampak langsung pada proses implementasi yang belum konsisten.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa implementasi wisata halal di Indonesia masih bersifat bertahap dan adaptif. Pemerintah daerah umumnya lebih menekankan pembinaan dan promosi dibandingkan penerapan standar pelayanan yang mengikat sehingga kualitas implementasi masih beragam.

Penelitian internasional juga menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian Rahmawati (2023) menegaskan bahwa implementasi halal *tourism* memerlukan koordinasi lintas sektor, standarisasi layanan, dan sistem pengawasan yang berkelanjutan agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Penelitian (Setya, Yuherawan, Suastuti, & Hasanah, 2023) juga menyatakan bahwa keberhasilan implementasi wisata halal sangat dipengaruhi oleh koordinasi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi. Dengan demikian, proses implementasi di Kota Mataram telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek standarisasi dan monitoring.

4. *Product*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram telah memberikan dampak positif, salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke *Islamic Center* NTB selama periode 2021–2025. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum dapat dijadikan indikator tunggal keberhasilan kebijakan karena belum tersedia indikator khusus yang mengukur dampak pengembangan wisata halal secara komprehensif.

Menurut teori CIPP, evaluasi produk bertujuan menilai sejauh mana tujuan program berhasil dicapai, baik dalam bentuk output maupun outcome (Stufflebeam, 2007). Berdasarkan perspektif tersebut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat dikategorikan sebagai output yang positif. Namun, evaluasi *outcome* masih belum optimal karena belum tersedia data mengenai tingkat kepuasan wisatawan Muslim, peningkatan pendapatan pelaku usaha halal, maupun kontribusi ekonomi secara spesifik dari implementasi pariwisata halal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa evaluasi wisata halal di Indonesia masih lebih banyak menggunakan indikator deskriptif, seperti jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi halal, sementara indikator kualitas pelayanan maupun kepuasan wisatawan belum banyak digunakan.

Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa keberhasilan halal *tourism* tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga melalui kepuasan wisatawan, loyalitas berkunjung kembali, kualitas layanan halal, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah (Saleh & Desky, 2022). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram telah menunjukkan perkembangan positif, tetapi sistem evaluasi kinerja masih perlu diperkuat dengan indikator yang lebih terukur sehingga dampak kebijakan dapat dinilai secara lebih komprehensif.

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan

No	Tahun	Kunjungan ke <i>Islamic Center</i>
1	2021	8.366 orang
2	2022	+35.000 orang
3	2023	+75.000 orang
4	2024	+100.000 orang
5	2025	124.785 orang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di *Islamic Center* mengalami peningkatan cukup signifikan. Secara teoritis, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator keberhasilan output kebijakan dalam model evaluasi CIPP (Stufflebeam, 2007), khususnya dalam melihat sejauh mana program mampu menghasilkan perubahan yang terukur. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, peningkatan tersebut belum dapat secara langsung dikaitkan sebagai dampak spesifik dari kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram. Namun demikian, peningkatan jumlah kunjungan tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan sebagai dampak dari kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram. Hal ini karena tidak terdapat data spesifik yang secara langsung mengukur kontribusi kebijakan tersebut terhadap peningkatan jumlah wisatawan.

Tantangan dan Peluang Evaluasi Pariwisata Halal di Kota Mataram

1. Context

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram didorong oleh kondisi sosial budaya masyarakat yang mayoritas beragama Islam serta potensi daerah sebagai pintu gerbang wisata Pulau Lombok. Namun demikian, arah kebijakan tersebut belum didukung oleh regulasi teknis yang secara khusus mengatur implementasi pariwisata halal di tingkat daerah. Kebijakan yang ada masih mengacu pada RIPPARDA dan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga belum mampu menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan.

Apabila dianalisis menggunakan teori CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2007), aspek *context* bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, peluang, serta permasalahan yang menjadi dasar penyusunan suatu program. Berdasarkan teori tersebut, pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram telah memenuhi unsur kebutuhan (*needs assessment*) karena lahir dari karakteristik masyarakat dan potensi daerah. Akan tetapi, belum tersedianya regulasi teknis menunjukkan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang jelas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai pengembangan wisata halal di Indonesia yang menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah telah memiliki potensi wisata halal, tetapi implementasinya masih terkendala oleh belum adanya regulasi daerah yang spesifik dan indikator keberhasilan yang terukur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan lebih bersifat adaptif dibandingkan berbasis standar yang baku.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian internasional yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2023), yang menjelaskan bahwa keberhasilan halal *tourism* tidak hanya ditentukan oleh karakteristik masyarakat Muslim, tetapi juga oleh adanya kebijakan pemerintah yang jelas, tata kelola yang baik, dan arah pengembangan

yang terintegrasi. Oleh karena itu, meskipun Kota Mataram memiliki konteks sosial yang sangat mendukung, penguatan regulasi daerah masih diperlukan agar tujuan pengembangan pariwisata halal dapat diwujudkan secara lebih efektif.

2. *Input*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *input* dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dukungan kelembagaan. Belum seluruh pelaku usaha memahami standar pelayanan halal, sementara fasilitas pendukung seperti restoran bersertifikat halal, informasi wisata halal, dan pendampingan sertifikasi masih belum tersedia secara merata.

Menurut teori CIPP, evaluasi input digunakan untuk menilai kecukupan sumber daya, strategi, organisasi, dan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan program (Stufflebeam, 2007). Berdasarkan perspektif tersebut, kesiapan *input* di Kota Mataram belum sepenuhnya memadai karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan program dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengembangan pariwisata halal secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa hambatan utama pengembangan wisata halal di Indonesia terletak pada rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya sertifikasi halal, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, keberadaan UMKM kuliner yang pada dasarnya telah menerapkan prinsip halal menjadi modal penting untuk dikembangkan melalui program pembinaan dan sertifikasi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian internasional yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2023) yang menegaskan bahwa destinasi halal memerlukan dukungan fasilitas halal yang lengkap, sumber daya manusia yang kompeten, serta kelembagaan yang mampu menjamin kualitas layanan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penyediaan fasilitas pendukung, dan perluasan program sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam memperkuat aspek input pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram.

3. *Process*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pariwisata halal di Kota Mataram dilakukan melalui integrasi ke dalam program-program Dinas Pariwisata, seperti promosi destinasi, pembinaan UMKM, penyelenggaraan *event*, dan penyediaan fasilitas ibadah. Namun demikian, implementasi di lapangan masih belum berjalan secara konsisten karena belum adanya standar layanan yang seragam serta sistem monitoring yang terstruktur.

Dalam teori CIPP, evaluasi *process* bertujuan menilai apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stufflebeam, 2007). Berdasarkan teori tersebut, proses implementasi di Kota Mataram telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengembangkan wisata halal, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui standardisasi layanan, pengawasan yang berkelanjutan, dan koordinasi lintas sektor.

Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa implementasi wisata halal di Indonesia masih dilakukan secara bertahap melalui pendekatan pembinaan dan sosialisasi, sehingga kualitas penerapan antar pelaku

usaha masih bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi belum sepenuhnya menghasilkan standar pelayanan yang seragam.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian internasional yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi halal tourism memerlukan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan masyarakat. (Rahmawati, 2023) menegaskan bahwa standardisasi layanan serta monitoring yang berkesinambungan merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas destinasi halal. Oleh karena itu, pengembangan sistem monitoring berbasis digital dan penyusunan standar operasional dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di Kota Mataram.

4. *Product*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram telah memberikan dampak positif, terutama melalui meningkatnya aktivitas pariwisata dan bertambahnya jumlah kunjungan pada destinasi bernuansa religi. Namun demikian, manfaat kebijakan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha karena masih terdapat kesenjangan antara pelaku usaha yang telah memperoleh pembinaan dan sertifikasi halal dengan yang belum. Selain itu, belum tersedianya indikator khusus menyebabkan keberhasilan kebijakan masih sulit diukur secara kuantitatif.

Menurut teori CIPP, evaluasi *product* bertujuan menilai sejauh mana program mampu menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Stufflebeam, 2007). Berdasarkan teori tersebut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat dikategorikan sebagai output yang positif. Namun, outcome yang mencerminkan keberhasilan kebijakan secara menyeluruh, seperti peningkatan kepuasan wisatawan Muslim, peningkatan pendapatan pelaku usaha, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah, masih belum dapat dievaluasi secara komprehensif karena belum tersedianya indikator evaluasi yang spesifik.

(Aulia, 2025) menunjukkan bahwa dampak ekonomi wisata halal cenderung terkonsentrasi pada pelaku usaha yang telah memiliki kesiapan modal, jaringan, dan sertifikasi. Tanpa intervensi kebijakan yang memperluas akses sertifikasi dan pendampingan, ketimpangan manfaat ekonomi berpotensi meningkat. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa *outcome* kebijakan di Kota Mataram masih bersifat terbatas dan belum inklusif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa evaluasi wisata halal di Indonesia masih didominasi oleh indikator deskriptif, seperti jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah sertifikasi halal, sementara indikator kualitas layanan, kepuasan wisatawan, dan dampak ekonomi masih relatif jarang digunakan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian internasional yang menyatakan bahwa keberhasilan halal *tourism* tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga melalui tingkat kepuasan wisatawan, loyalitas untuk berkunjung kembali, kualitas pelayanan, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah (Rahmawati, 2023). Dengan demikian, evaluasi produk pada pengembangan pariwisata halal di Kota Mataram perlu diperkuat melalui penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur agar dampak kebijakan dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi dengan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*), implementasi kebijakan pariwisata halal di Kota Mataram telah berjalan namun belum optimal dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim secara merata. Dari aspek *context*, arah kebijakan sudah tersedia dan didukung kondisi sosial masyarakat yang mayoritas Muslim, tetapi belum dilengkapi regulasi teknis yang jelas serta pemahaman pelaku usaha yang masih terbatas. Dari aspek *input*, terdapat potensi sumber daya yang cukup baik, namun belum merata baik dari sisi fasilitas pendukung halal maupun kapasitas SDM. Pada aspek *process*, pelaksanaan program masih bersifat integratif dengan kegiatan yang sudah ada, tetapi belum memiliki standar operasional yang jelas serta sistem monitoring yang terstruktur. Sementara itu, pada aspek *product*, program telah memberikan dampak awal terhadap pengembangan pariwisata halal, namun hasilnya belum merata dan belum terukur secara optimal karena keterbatasan indikator evaluasi.

Tantangan utama dalam implementasi dan evaluasi pariwisata halal di Kota Mataram meliputi belum adanya regulasi teknis yang spesifik, keterbatasan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, belum meratanya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang terukur. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata halal juga masih perlu ditingkatkan. Namun demikian terdapat peluang cukup besar, seperti dukungan sosial masyarakat, potensi pasar wisatawan Muslim yang terus meningkat, serta adanya integrasi program dengan sektor pariwisata yang sudah berkembang, jika didukung dengan penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, serta sistem pelaksanaan dan evaluasi yang lebih terstruktur, maka pariwisata halal di Kota Mataram berpotensi berkembang secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adinda, Z., Kusumasari, B., Hadna, A. H., & Susanto, N. (2024). Halal tourism: a critical review of the development and implementation. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 28(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/jkap.90194>
- [2] Aulia, A., Aulia, Z., Nufus, T., & Tasya, N. (2025). Peran sektor pariwisata halal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Utara. *Seminar Nasional Pariwisata dan Keriwausahaan (SNPK)*, 4, 84–94. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.317>
- [3] Angraini, Ni Putu Deby, Ayu, Ida, & Martini, Oka. (2024). Implementation of halal industry policy as a support for halal tourism in Lombok. *Journal of Universal Studies*, 4(9), 8381–8396. <https://doi.org/10.62012/jus.v4i9.3176>
- [4] Basit, A. (2021). Strategi pengembangan pariwisata halal di Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. *Tourism Scientific Journal*, 7(1), 130–154. <https://doi.org/10.32659/tsj.v7i1.143>
- [5] Fadhlani, M., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan industri wisata halal di Indonesia dan dunia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 76–80. <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14385>

- [6] Huda, A. M. (2021). Implementasi instrumen hukum syariah dalam pariwisata halal (Tinjauan Fatwa DSN MUI). *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)*, 2(2), 13–22. <https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.5320>
- [7] Hidayat, R. (2025). *Critical factors influencing the implementation of digital government: The case of population administration service*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(3), 710–723. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i3.64366>
- [8] Junardi, N., Safitri, N. I., Hairunnisah, S., Anggriani, R., Aprilia, R., Adawyah, S., & Hidayat, R. (2025). *Evaluation of the utilization of health services at the Sekotong Community Health Center in a review of the New Public Service (NPS) theory*. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.64581/jid.v3i1.158>
- [9] Muthoharoh, S. (2025). Ekonomi halal berbasis pariwisata syariah: *Peluang dan tantangan*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/715>
- [10] Patrianti, T., & Binol, R. (2019). Public relations & messaging development: Pengembangan pesan pariwisata halal di Indonesia melalui perspektif public relations. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.24853/pk.3.1.50-58>
- [11] Pratama, Muhammad Yusuf, & Annuha, Ahmad Nabil. (2024). Digital da'wah transformation of Nahdlatul Ulama: *Religious moderation strategies in the technological era*. *Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 2(2), 321–338. <https://doi.org/10.69526/jnucis.v2i2.76>
- [12] Saleh, Muhammad, & Desky, Harjoni. (2022). Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(April), 1221–1238. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.767>
- [13] Rahmawati, R., Mahyarni, M., & Zuhadi, T. (2023). Pengaruh label halal dan penggunaan digital marketing terhadap pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Siak. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(2), 72–80. <https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15053>
- [14] Rustam, D., Putri, W., & Islamiah, N. (2025). Peran wisata halal dalam meningkatkan ekonomi lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.117>
- [15] Stufflebeam, Daniel L., & Shinkfield, Anthony J.. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- [16] Wahyuni, Sri, Ar, Safitri, Khasanah, Umrotul, & Munir, Misbahul. (2024). *Fenomena pariwisata halal di Kota Batu*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 3221–3232. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15169>